

POKOK-POKOK

APBN 2020

AKSELERASI DAYA SAING MELALUI INOVASI
DAN PENGUATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

MENDUKUNG

INDONESIA MAJU



REPUBLIK INDONESIA

#UANGKITA

POKOK-POKOK APBN 2020



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan penuh rasa syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 18 Oktober 2019, Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2020 telah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun Anggaran 2020. Tahun 2020 menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal bagi bangsa Indonesia yang akan memulai tahapan pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Pada tahap pertama menuju visi jangka panjang Indonesia, prioritas pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat pondasi daya saing sebagai pijakan bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya yaitu periode transisi dalam memperkuat daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun 2036- 2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang secara tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.

Melalui APBN Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 24 September 2019, kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Di sisi lain, Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi dengan lebih efisien dan efektif, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi.

Selanjutnya, dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengawal setiap rupiah yang ada di dalam APBN, sudah semestinya publik mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dimengerti atas berbagai kebijakan yang akan dijalankan Pemerintah melalui APBN. Dengan demikian, rasa memiliki yang tinggi terhadap APBN akan tertanam pada masyarakat sehingga menjadi bagian dari Pemerintah dalam mengawasi setiap rupiah yang dibelanjakan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada akhirnya, sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam mewujudkan APBN yang kredibel, transparan dan akuntabel, kami berharap buku Pokok-pokok APBN 2020 ini dapat menjadi salah satu sumber yang valid dan terpercaya dalam memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai APBN tahun 2020 kepada masyarakat. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga buku Informasi APBN 2020 ini dapat diterbitkan.

Sri Mulyani

 Menteri Keuangan RI

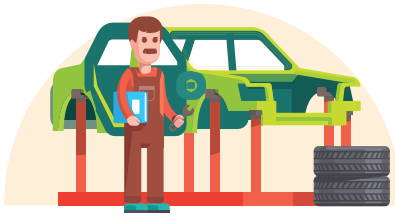


Siklus APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI



2045 Indonesia Negara Maju



2020-2030

Penguatan Pondasi

Penguatan Daya Saing

Pemerintah ditantang untuk merespon tantangan demografi melalui reformasi di segala bidang yang harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui konsumsi, investasi, dan produksi serta penguatan daya saing.



2031-2035

Transisi

Memperkokoh Daya Saing

Upaya yang ditempuh adalah peningkatan kualitas SDM agar semakin berdaya saing, mendorong infrastruktur yang telah dibangun agar dapat dioperasionalkan dengan optimal sehingga memberikan peningkatan produktivitas dan mendukung transformasi industrialisasi, serta program perlindungan sosial yang komprehensif sudah mulai diimplementasikan.



2036-2045

Indonesia Maju

Negara Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur

Indonesia diharapkan telah keluar dari jebakan pendapatan menengah sehingga Indonesia telah siap menuju negara maju, mandiri, adil dan makmur.

Tema Kebijakan Fiskal 2020

APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM



mobilisasi **pendapatan negara** untuk menarik investasi dan mendorong daya saing



kebijakan **belanja negara** yang berkualitas



pembiayaan yang kreatif dan mitigasi risiko

Sebagai Tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045

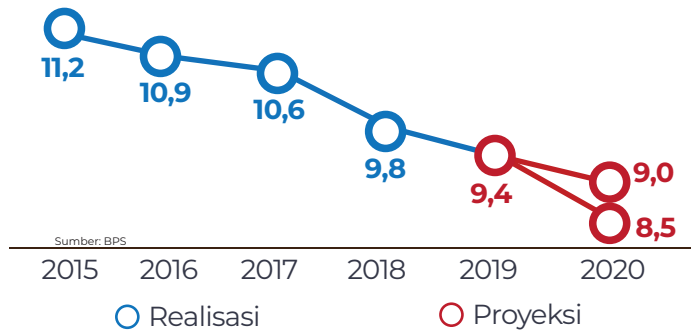
2020

Berbagai program Pemerintah terus diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan pendapatan

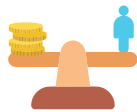
Tingkat Kemiskinan



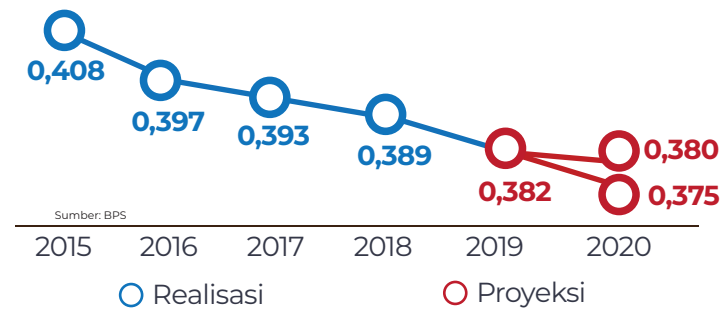
(persen)
penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program perlindungan sosial



Tingkat Ketimpangan



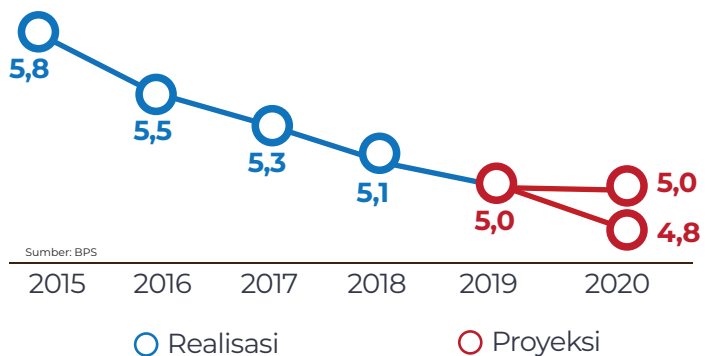
Penurunan tingkat ketimpangan menunjukkan terwujudnya pembangunan yang lebih berkeadilan



Tingkat Pengangguran



(persen)
Pemerintah akan terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta peningkatan sektor formal dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja



Hal Baru dan Strategis

Pemberian Insentif Perpajakan

dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing



Super deduction untuk kegiatan vokasi & litbang



Mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar



Investment allowance untuk industri padat karya

Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial



Kartu Indonesia Pintar Kuliah

mendukung kelanjutan pendidikan pada masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi



Kartu Sembako

mendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan



Kartu Pra Kerja

untuk peningkatan produktivitas bagi pencari kerja

Percepatan penyelesaian 5 destinasi pariwisata super prioritas



Pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang dengan sinergi lintas K/L dan Pemda

Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa



- Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru: sosial dan transportasi laut
- Pengalokasian DAU Tambahan untuk Penyetaraan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Penguatan Neraca Transaksi Berjalan



Mendukung penurunan defisit neraca transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun pendek

Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan

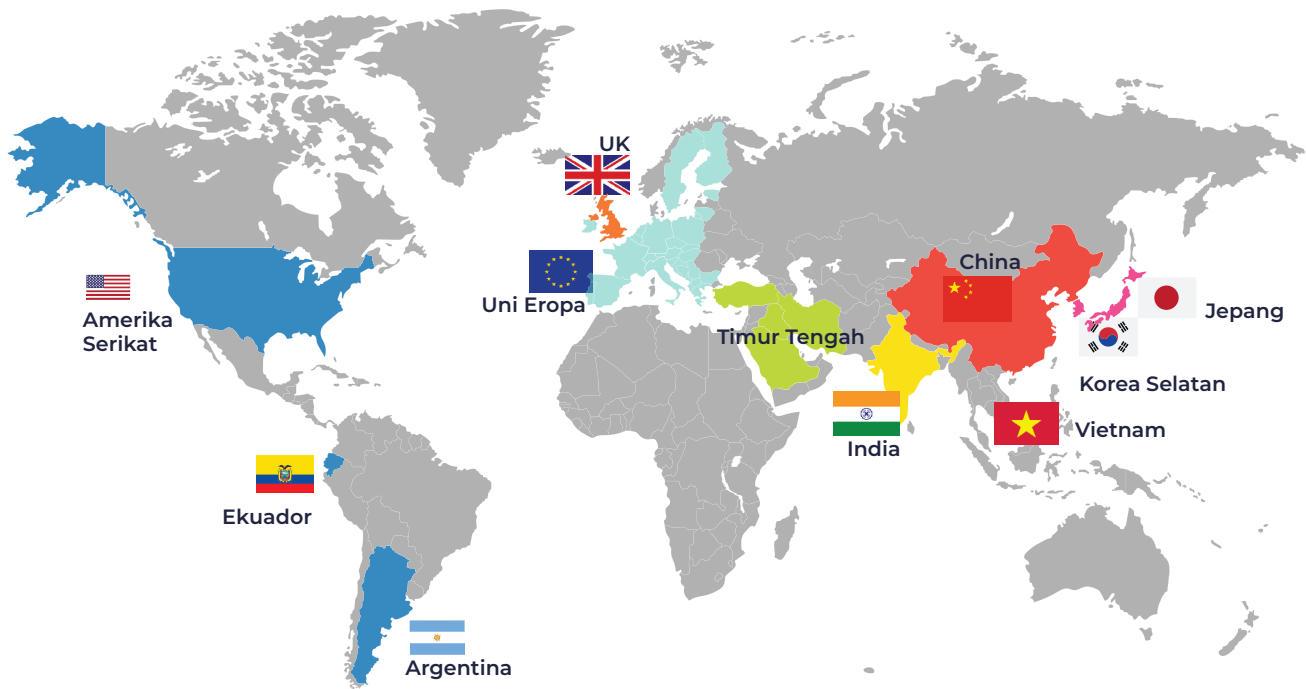


Pemanfaatan hasil investasi dana abadi antara lain untuk pemajuan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas perguruan tinggi, melalui:

- Dana abadi kebudayaan
- Dana abadi perguruan tinggi
- Penambahan dana abadi penelitian secara signifikan

Perekonomian Dunia cenderung melemah

ditengah risiko ketidakpastian yang tinggi dari perang dagang dan dinamika geopolitik



Amerika Serikat

- Belum tercapai kesepakatan perdagangan antara AS dan China
- Ancaman *impeachment* Presiden Trump oleh Kongres
- Stimulus moneter The Fed dengan penurunan 25 bps menyebabkan pelonggaran likuiditas global



Ekuador

- Krisis politik akibat penghapusan subsidi



Argentina

- Resesi Ekonomi



UK

- Mitigasi *Non Deal Brexit* :
 - Proyeksi defisit akan melebar
 - Ancaman resesi 2020



Uni Eropa

- Perlambatan Ekonomi
- Stimulus ECB



Timur Tengah



- Ketegangan di Timur Tengah:
 - Serangan Turki ke pemberontak Kurdi dukungan AS di Suriah
 - Serangan terhadap tanker minyak Iran (dikhawatirkan memicu serangan balasan)
 - Penempatan pasukan tambahan AS di Arab Saudi yang dapat dianggap sebagai persiapan serangan ke Iran
 - Demonstrasi di Irak menuntut perbaikan kondisi ekonomi



China



- Krisis politik di Hongkong akibat demonstrasi yang terus berlanjut
- Perang tarif dengan AS
- Stimulus PBOC melalui tambahan likuiditas 200 miliar yuan melalui pinjaman ke sistem perbankan dengan tenor 1 tahun



India



- Memasuki perlambatan ekonomi



Jepang



- Perang Dagang



Korea



Vietnam



- Ancaman *downgrade* karena permasalahan institusional yang berdampak keterlambatan pembayaran kewajiban utang



Indikator Ekonomi Makro dan Pembangunan

memperhatikan perkembangan perekonomian dan prospek serta risiko ke depan



Indikator Ekonomi Makro

Terdapat perubahan pada harga dan *lifting* minyak dengan mempertimbangan harga minyak dunia dan prospek *lifting* minyak ke depan



Pertumbuhan Ekonomi (%)

■ 5,3 ● 5,2



Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)

■ 14.400 ● 14.250



Inflasi (%)

■ 3,1 ● 3,1



Harga Minyak (USD/barel)

■ 63 ● 63



Suku Bunga SPN (%)

■ 5,4 ● 5,6



Lifting Minyak (ribu barel/hari)

■ 755 ● 754



Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)

■ 1.191 ● 1.072



APBN 2020



Outlook APBN 2019



Pengangguran (persen)

4,8-5,0



Kemiskinan (persen)

8,5 - 9,0



Rasio Gini

0,375-0,380



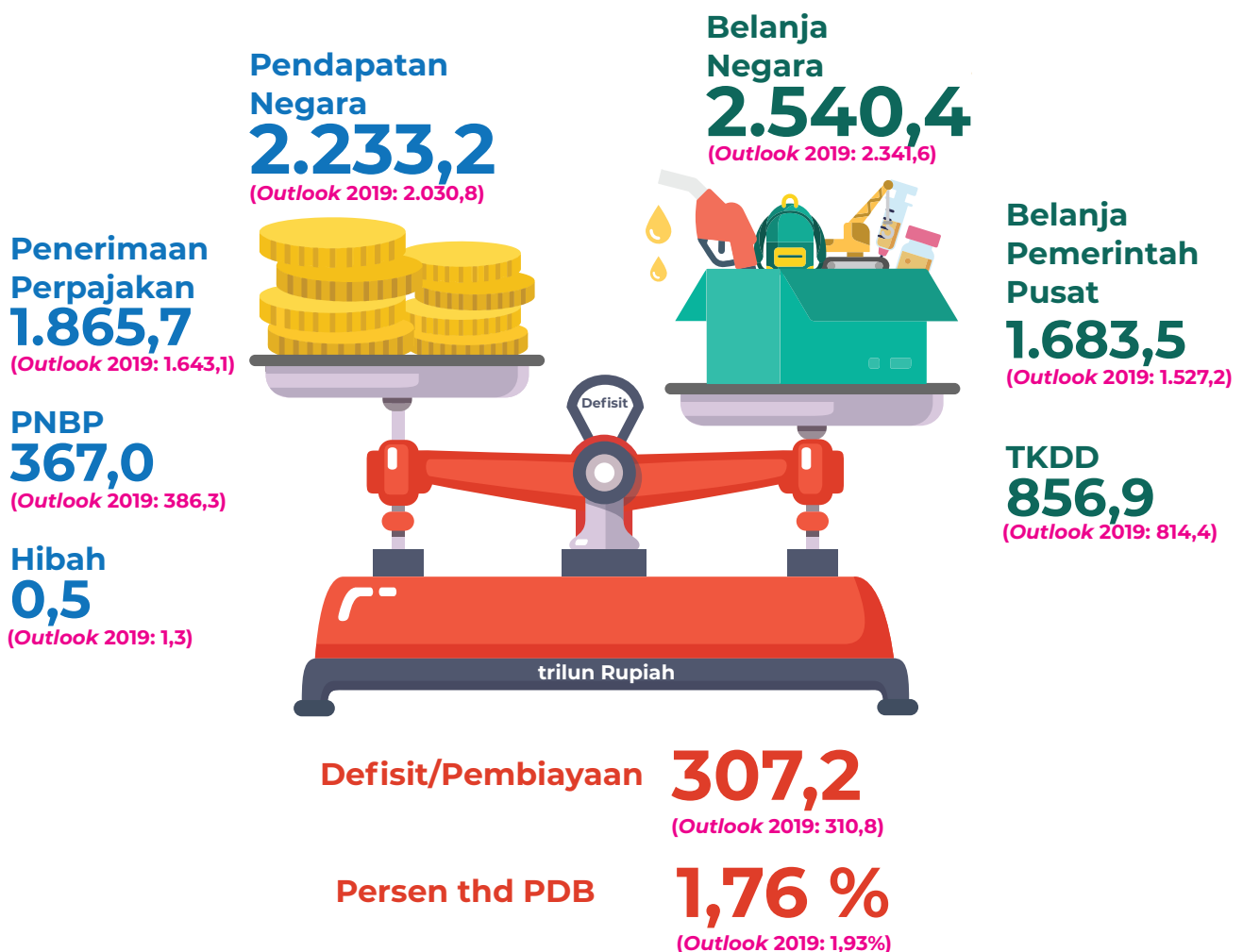
Indeks Pembangunan Manusia

72,51

Target Pembangunan

Upaya meningkatkan kesejahteraan a.l ditunjukkan dengan kesepakatan untuk menurunkan target tingkat pengangguran di dalam APBN 2020

Postur APBN 2020



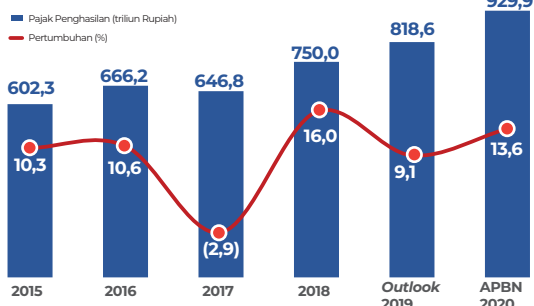
diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan namun tetap mampu adaptif menghadapi risiko perekonomian

Penerimaan Perpajakan

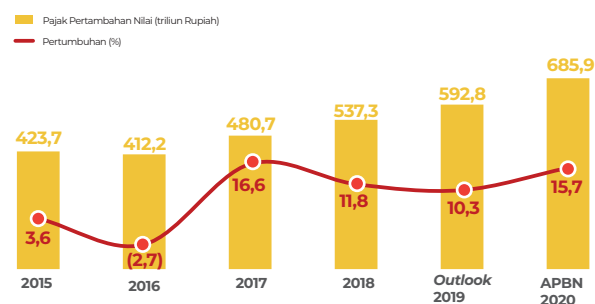
terus dioptimalkan dengan tetap memberikan insentif untuk mendukung investasi dan daya saing



Pajak Penghasilan



Pajak Pertambahan Nilai



Insentif PPh

- *super deduction* untuk kegiatan vokasi & litbang
- *mini tax holiday* untuk investasi <Rp500 M
- *investment allowance* untuk industri padat karya
- PPh DTP antara lain sektor panas bumi, PPh SBN Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020



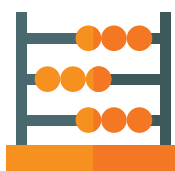
Insentif PPN

- Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang strategis --> mesin dan peralatan pabrik
- PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api)

Tax Expenditure

Dukungan Perpajakan pada iklim usaha juga tercermin pada Kebijakan Belanja Perpajakan. Insentif pajak yang tepat sasaran mendorong Pemerintah mampu memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian

Definisi



Penerimaan perpajakan yang hilang/berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan secara umum yang menyasar sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu

Estimasi

Tax Expenditure

2016	2017	2018
Rp192,6 T	Rp196,8 T	Rp221,1 T
1,55% PDB	1,45% PDB	1,49% PDB

Bentuk



- *Tax Holiday*
- *Tax Allowance*
- Segala bentuk pengecualian atau perbedaan pengenaan perpajakan dari ketentuan umum perpajakan yang berlaku

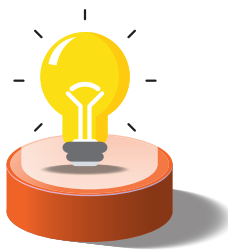
Insentif Pajak

Pajak diarahkan tidak hanya sebagai sumber penerimaan namun juga instrumen untuk mendorong daya saing dan kualitas SDM Indonesia



Super deduction untuk R&D

Pengurangan pendapatan kotor **paling banyak 300%** dari biaya aktivitas R&D *activities* yang dilakukan di Indonesia



Super deduction untuk Pelatihan Vokasional

Pengurangan pendapatan kotor **paling banyak 200%** dari total biaya aktivitas vokasional.



Investment Allowance untuk industri padat karya

Pengurangan **pendapatan bersih sebesar 60%** dari total investasi untuk industri padat karya.

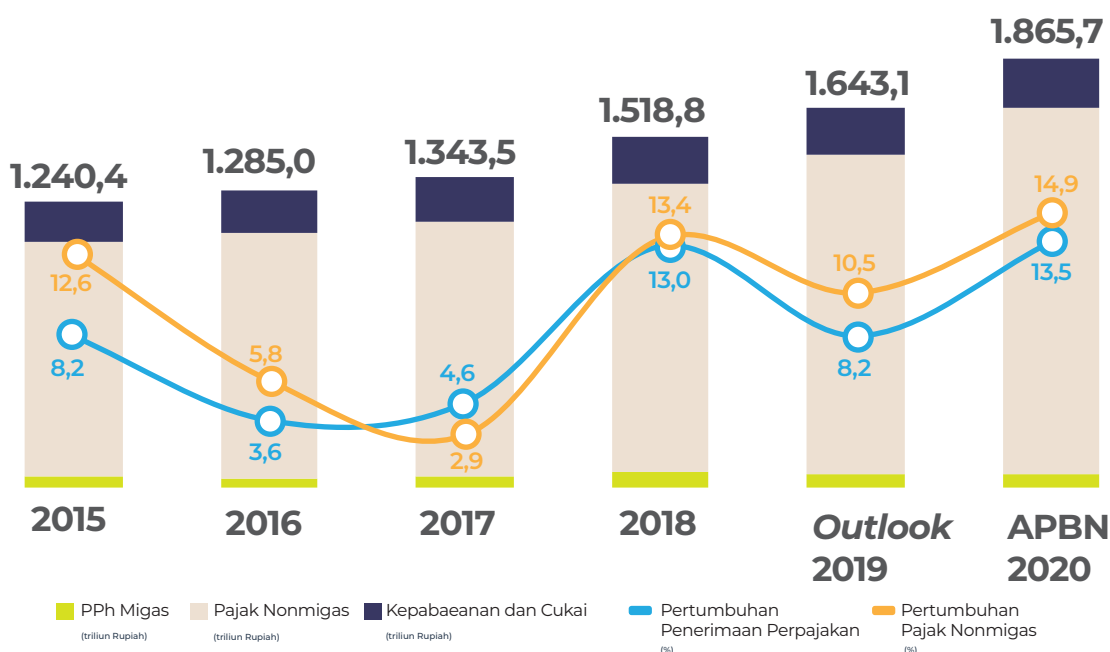
Super Deduction

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019



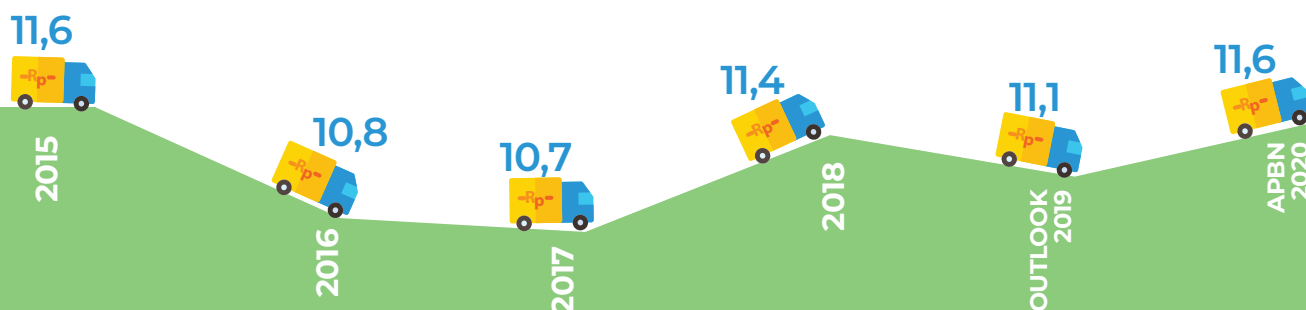
Penerimaan Pajak

Perlu dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan **Pajak Kuat** untuk **Indonesia Maju**



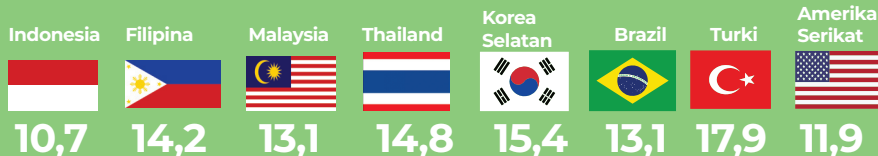
Tax Ratio

% thdp PDB



Perbandingan Tax Ratio Antar Negara (2017,%)

Sumber : World Development Indicator, World Bank



Kepabeanan dan Cukai

Peningkatan penerimaan Kepabeanan dan Cukai melalui penguatan pengawasan dan instrumen tarif

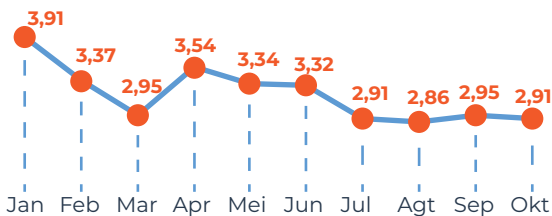
Kebijakan

- Penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau dan pemberantasan pita cukai ilegal
- Ekstensifikasi barang kena cukai baru (a.l. kantong plastik)
- Penerapan fleksibilitas *earmarking* pada pungutan cukai
- Melanjutkan program pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal
- Melanjutkan kebijakan penertiban importir, eksportir dan cukai berisiko tinggi
- Penyempurnaan implementasi Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa (SKPJ)
- Pengembangan/perluasan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah (IKM)

Trade Facilitator

Percepatan layanan & kemudahan prosedural impor yg berkontribusi terhadap

Penurunan Dwelling Time 2019



Industrial Assistance

Pemberian fasilitas fiskal dan prosedur kepabeanan kepada :

1.371 KB
Kawasan Berikat

242 GB
Gudang Berikat

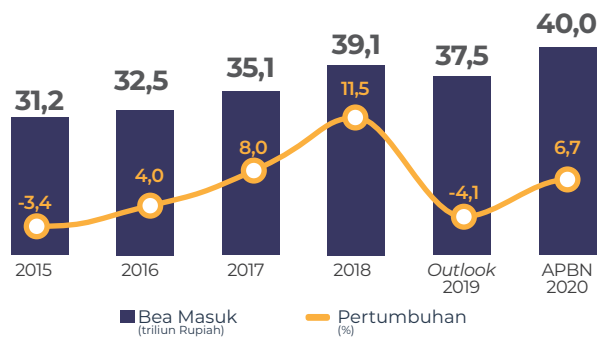
33 TBB
Toko Bebas Bea

8 ETP
Entrepot untuk Tujuan Pameran

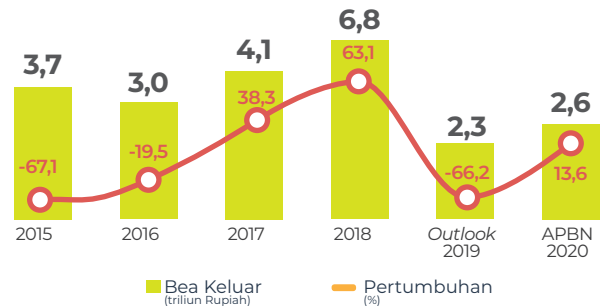
379 KITE
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

12 KEK
Kawasan Ekonomi Khusus

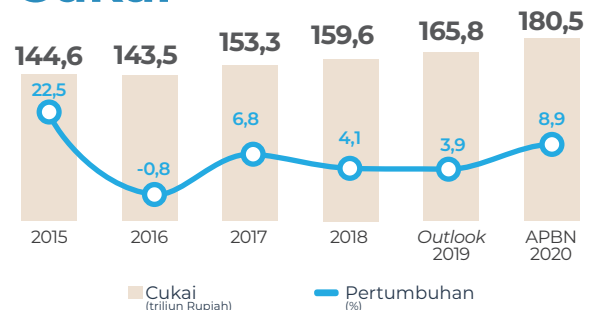
Bea Masuk



Bea Keluar

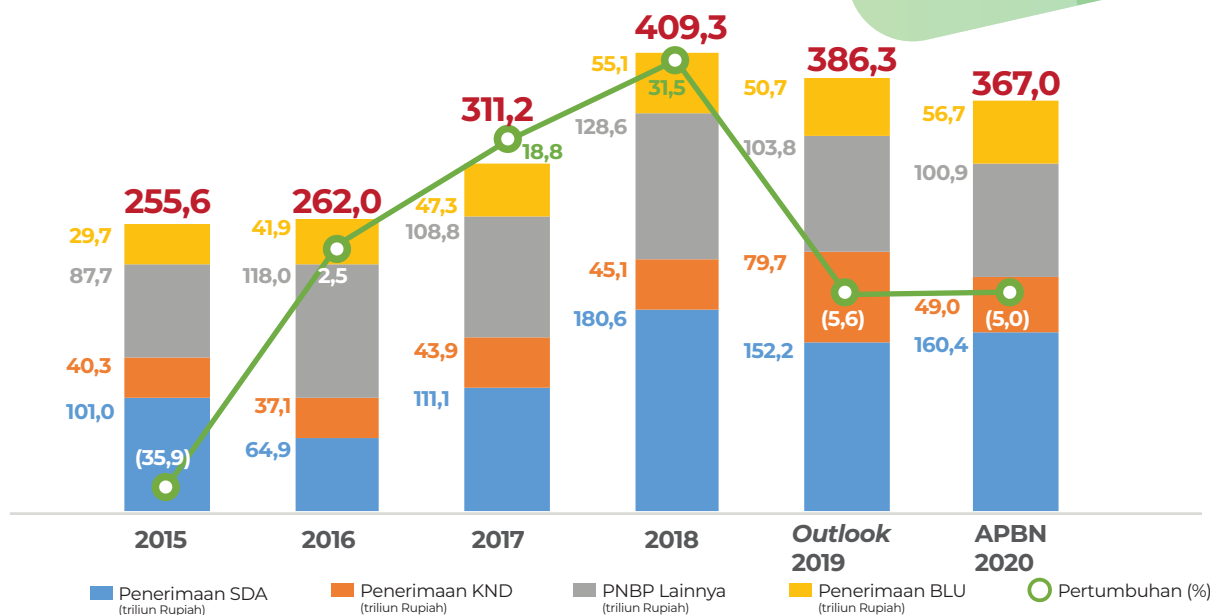


Cukai



PNBP

Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuat disertai peningkatan layanan kepada masyarakat



Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien

- Penyempurnaan regulasi dan kontrak
- Efisiensi kegiatan
- Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan

Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU

- Mempertimbangkan *cashflow* BUMN dan kemampuan keuangan BUMN
- Pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah
- Pelayanan BLU yang lebih profesional

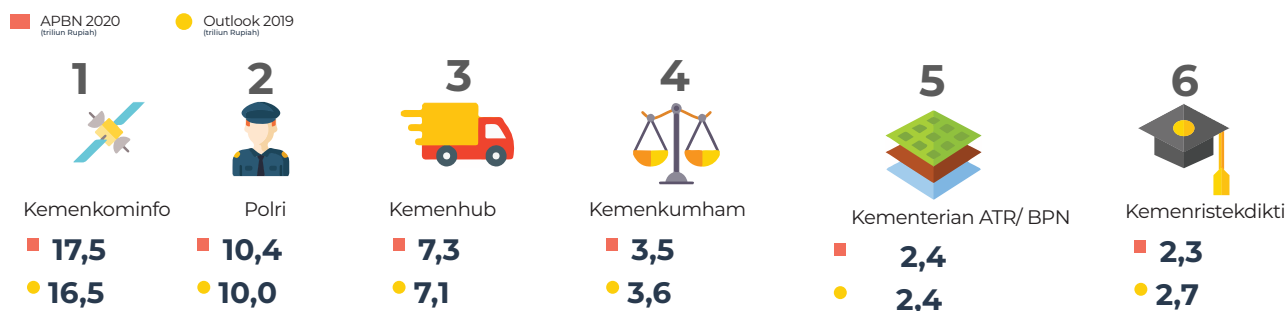
Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif

- Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha
- Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Penyempurnaan Tata Kelola

- implementasi UU PNBP dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan UU PNBP
- Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan

PNBP Lainnya: 6 K/L Terbesar



Fokus Belanja Pemerintah Pusat



SDM yang berkualitas

Anggaran Pendidikan Rp508,1 T
Anggaran Kesehatan Rp132,2 T



- Peningkatan produktivitas/daya saing SDM
- Perluasan akses pendidikan, peningkatan *skill*, *entrepreneurship*, ICT, penelitian
- Percepatan pengurangan *stunting*, promotif preventif, program jaminan kesehatan nasional

Penguatan Program Perlindungan Sosial

Anggaran Perlindungan Sosial Rp372,5 T



- Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
- Peningkatan akurasi data dan perbaikan penyaluran,
- Sinergi/sinkronisasi antar program
- Subsidi yang tepat sasaran dan efektif

Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur Rp 423,3 T



- Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
- Mendukung transformasi industrialisasi
- Mendorong skema pembiayaan kreatif (KPBU: VGF atau AP)

Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi

Anggaran Birokrasi Rp261,3 T



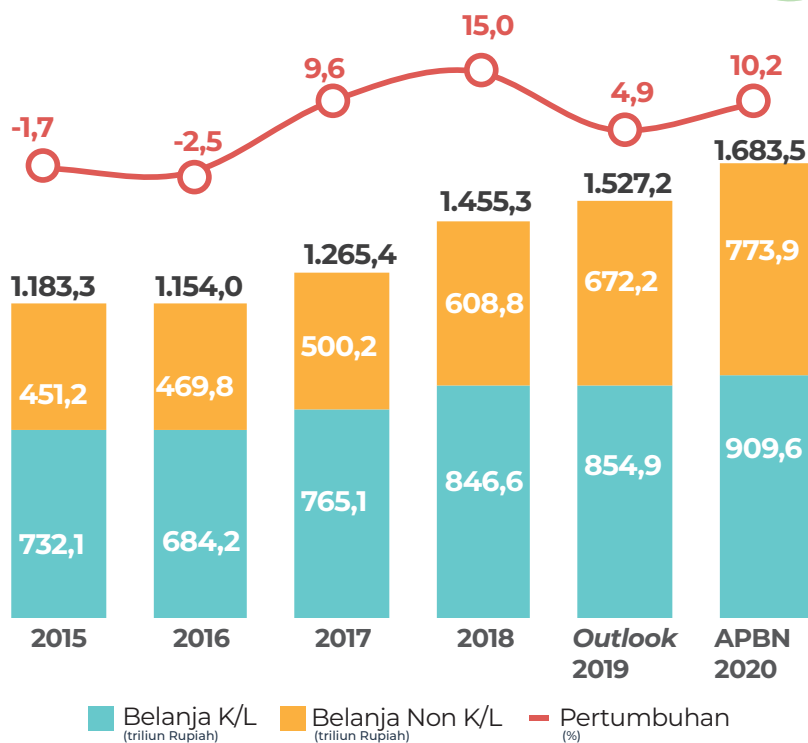
- Mendorong efektivitas birokrasi
- Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan
- Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT (Teknologi Informasi Komunikasi)

Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi Global & Domestik



- Mitigasi risiko bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
- Penguatan cadangan risiko fiskal

Belanja Pemerintah Pusat



Peningkatan kualitas SDM

KIP Kuliah

mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi

Kartu Pra Kerja

untuk Peningkatan Produktivitas --> Bagi Pencari Kerja

Keberlanjutan penyediaan layanan kesehatan (kenaikan besaran bantuan iuran)

Penguatan Perlindungan Sosial

Peningkatan akses pangan (Kartu Sembako)

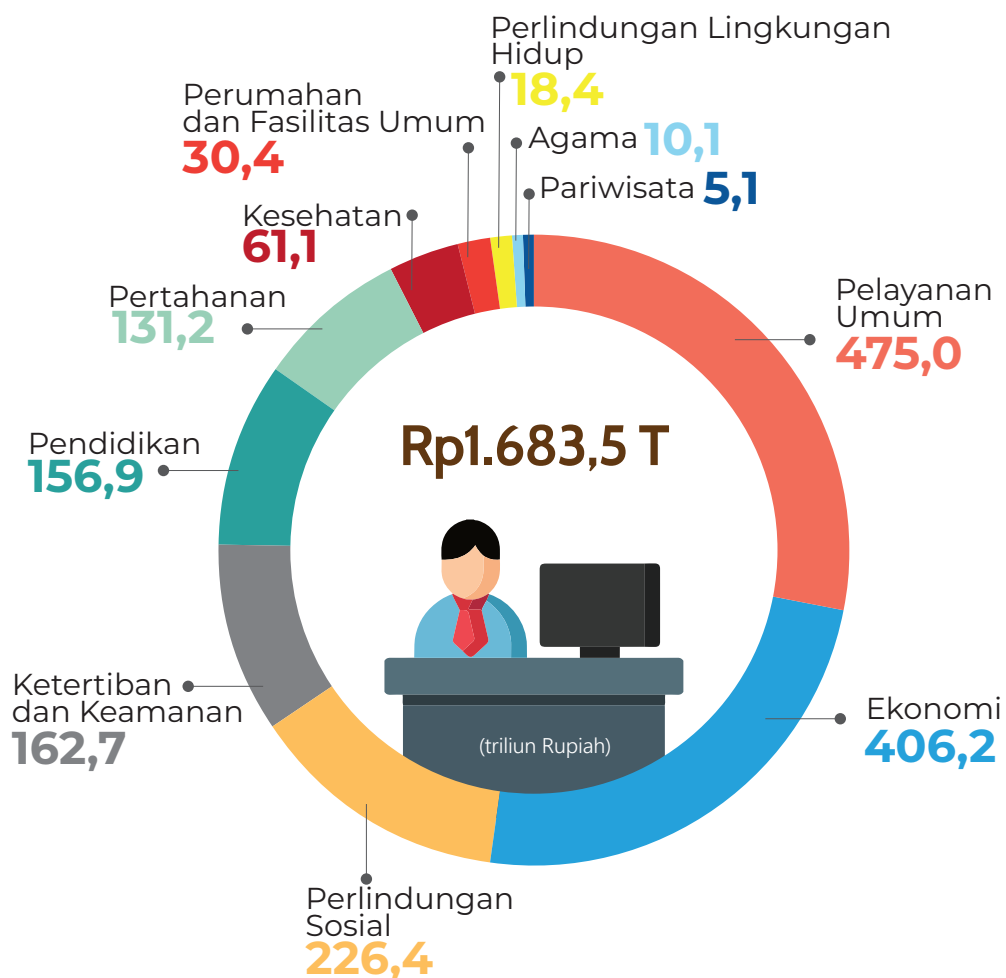
Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan antar wilayah

Percepatan **pengembangan 5 destinasi wisata** super prioritas

Belanja Menurut Fungsi

Menggambarkan fokus pemerintah dalam melaksanakan berbagai prioritas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan



3 fungsi terbesar

Fungsi Pelayanan Umum : dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemenuhan Pemerintah untuk pembayaran bunga utang

Fungsi Ekonomi : untuk mendukung strategi kebijakan Pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan informatika, serta peningkatan akses permodalan dan daya saing UMKM serta koperasi

Fungsi Perlindungan Sosial : untuk mendukung penguatan kualitas SDM melalui penguatan perlindungan sosial

Peningkatan Kualitas Belanja



Penghematan belanja barang al. barang non-operasional (honor, bahan, dan ATK), perjalanan dinas dan paket *meeting*.

Penajaman dan sinkronisasi antara K/L & Pemda dalam belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda;

Pemanfaatan hasil efisiensi digunakan untuk penguatan reformasi birokrasi

Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap efektivitas kinerja pemerintahan dan penurunan tingkat korupsi

Efektivitas birokrasi menjadi kunci untuk mendorong reformasi fiskal (pendapatan, belanja, dan pembiayaan)

Reformasi gaji dan pensiun dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong efektivitas birokrasi

Belanja pegawai didorong meningkat untuk mendukung reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi.



Refocusing belanja modal untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing al. energi, pangan, air, penguatan konektivitas, dan transportasi massal

Pembatasan pengadaan kendaraan bermotor dan pembangunan gedung baru

Mendorong agar K/L proaktif mengembangkan skema pembiayaan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD dan BLU

Integrasi dan sinergi antarprogram bansos dan subsidi

Bansos yang komprehensif: berbasis siklus hidup, antisipasi *ageing population*.

Memperkuat kualitas implementasi program (peningkatan ketepatan sasaran, pemanfaatan ICT, dan penguatan money)

Mendorong pemberdayaan dan melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan (sinergi dengan program kewirausahaan atau ketenagakerjaan)

10 K/L Pagu Terbesar

diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam



Kementerian Pertahanan



Kementerian PUPR



Polri



Kementerian Agama



Kementerian Sosial



Kementerian Kesehatan



Kementerian Perhubungan



Kemenristekdikti



Kementerian Keuangan

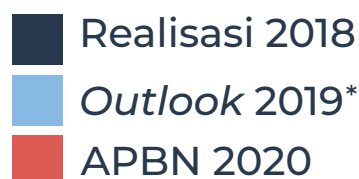
(Tidak termasuk anggaran BLU Kelapa Sawit)



Kemendikbud



(triliun Rupiah)

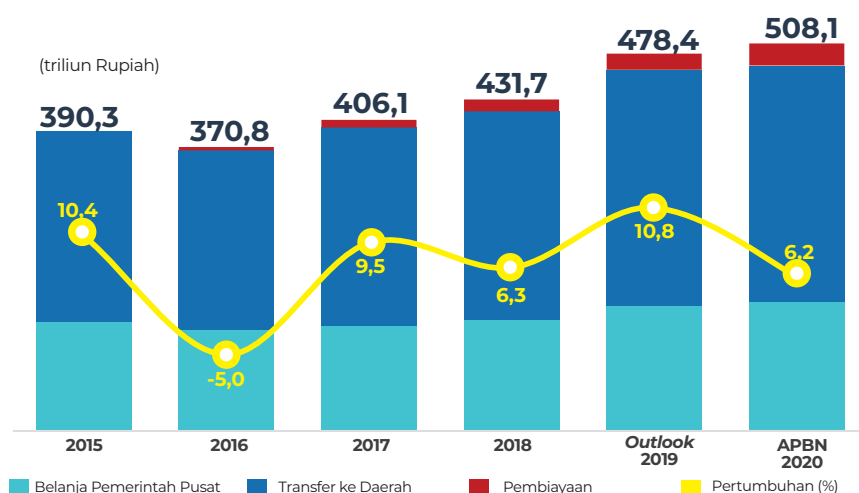


* Outlook 2019 bersifat perkiraan dengan memperhatikan kinerja penyerapan beberapa tahun terakhir



Anggaran Pendidikan

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan



APBN 2020 (triliun Rupiah) Outlook 2019 (triliun Rupiah)

Pemerintah Pusat

172,2 153,9

Transfer ke Daerah

306,9 303,5

Pembiayaan (Dana Abadi)

29,0 21,0

20,0% thd APBN 2020

Kebijakan

1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi

- Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS
- KIP Kuliah (perluasan/penyempurnaan bidik misi)

2. Melanjutkan percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)

3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM

- Pendidikan vokasi --> penguasaan *skill*, *entrepreneurship* dan ICT sesuai kebutuhan industri
- Kartu Pra kerja

4. Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah :

- Dana Abadi Pendidikan
- Dana Abadi Penelitian
- Dana Abadi Perguruan Tinggi
- Dana Abadi Kebudayaan

Indikator Pendidikan

Indeks Pembangunan Manusia

72,51 71,98

APK Pendidikan SMP/Sederajat

92,73 92,05

APK Pendidikan SMA/Sederajat

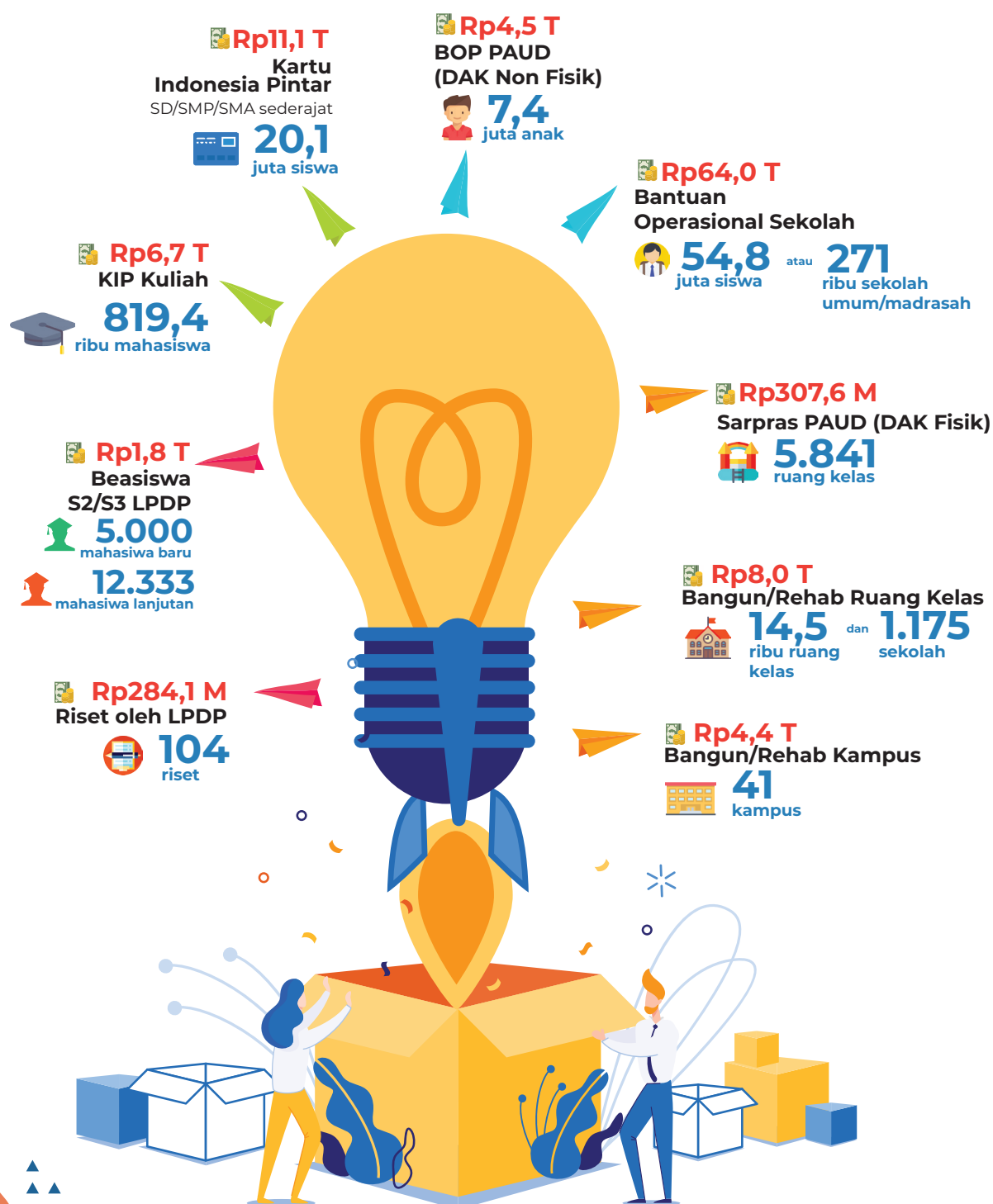
81,52 80,78

Proporsi Pekerja Berkeahlian Menengah & Tinggi (%)

43,0 41,0

Target Pendidikan

APBN untuk mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM



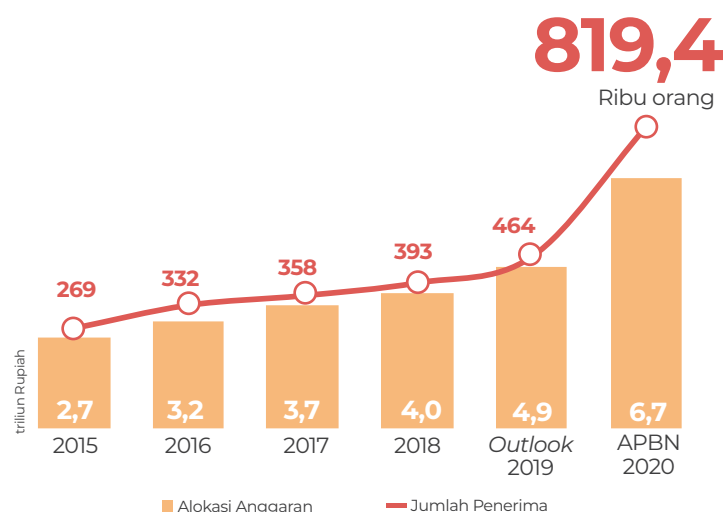
Kartu Indonesia Pintar Kuliah

diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan *skill* SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan



KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi

Agar setelah lulus dapat langsung bekerja --> jurusan diutamakan vokasi/poltek/sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.



Kriteria penerima KIP Kuliah

- Lulusan pemegang KIP.
- Diterima di PTN/PTS/prodi terakreditasi A/B.
- Dari keluarga tidak mampu dan penerima PKH



Biaya hidup

4,2

juta rupiah/mhs/smt



Sasaran Penerima

Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818,1 ribu mencakup:

Lanjutan Bidik Misi

Penerimaan mahasiswa baru

399,2

ribu mahasiswa

420,2

ribu mahasiswa

Bantuan Pendidikan

Biaya Pendidikan

2,4

juta rupiah/mhs/smt



Kartu Pra Kerja

Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (*skilling* dan *re-skilling*) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja.



Total anggaran 2020

Rp10 T

2 juta ^{target}
peserta



• Digital: 1,5 juta

• Reguler: 0,5 juta

Skilling

Sasaran : pencari kerja *fresh graduate*
Tujuan : *skill adjustment*, pembekalan *vocational skill* untuk bekerja
Outcome : mengurangi pengangguran

Re-Skilling

Sasaran : alih profesi, pekerja ter-PHK, atau berpotensi ter-PHK
Tujuan : pembekalan *vocational skill* yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausaha
Outcome : mencegah pengangguran kembali

Desain Implementasi

Digital

Pelatihan+insentif

Peserta memilih jenis pelatihan melalui platform digital.
Pelatihan disediakan oleh swasta*

► Pelatihan *Online* (*e-learning*) dan *Offline* (tatap muka)

*lembaga pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan manajemen pelaksana

Regular

Pelatihan + Sertifikasi + Insentif

Pelatihan dan Sertifikasi di LPK Pemerintah (termasuk BLK), LPK Swasta, dan TC Industri**

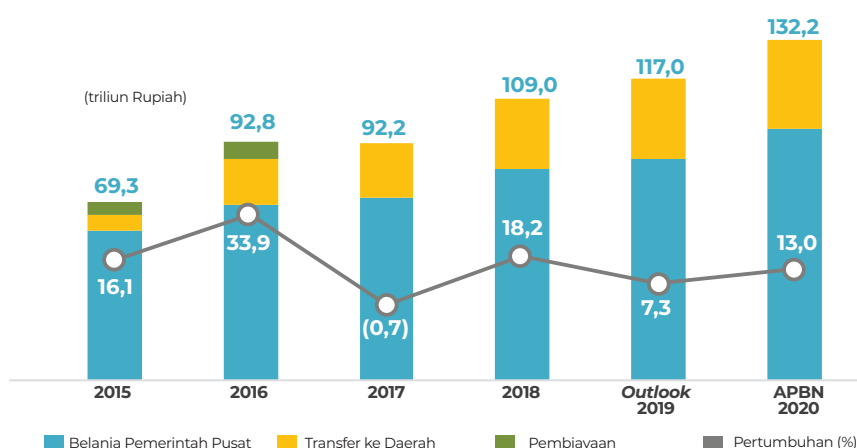
► Pelatihan *Offline* (tatap muka)

**tahap pengembangan selanjutnya



Anggaran Kesehatan

meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan *stunting*



APBN 2020 Outlook 2019
(triliun Rupiah) (triliun Rupiah)

Melalui Belanja Pusat

97,2 86,0

Melalui Transfer ke Daerah

34,9 31,0

5,2% thd APBN 2020

Kebijakan

Refocusing anggaran kesehatan

- mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah
- penggalan pajak baru (*negative externalities*) untuk kesehatan
- penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS

Penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood*

- meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita
- akselerasi penurunan *stunting*

Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan

- harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan faskes
- mendorong skema KPBU

Peningkatan level efektivitas program JKN

- peningkatan kualitas layanan kesehatan,
- *strategic purchasing* untuk efisiensi biaya manfaat,
- Penyesuaian besaran iuran PBI dan non PBI.

Indikator Kesehatan

Stunting (balita)

27,1% 30,8%

Insiden Tuberkulosis per 100 ribu penduduk

272 295

Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi malaria

325 300

Target Kesehatan

APBN untuk meningkatkan kesehatan rakyat Indonesia



Melalui K/L:



Penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN **96,8 juta jiwa (Rp 48,8 T)**



Perluasan lokasi prioritas program penurunan prevalensi *stunting* pada **260 kabupaten/kota**, dengan target prevalensi *stunting* pada balita sebesar **27,1 persen**



Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebanyak **233 FKTP**



Penugasan tenaga kesehatan **sebanyak 2.700 orang** ke daerah-daerah tertinggal



Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi **824.600 balita kurus**



Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi **466.450 ibu hamil** kurang energi kronik (KEK)



Imunisasi bayi usia 0-11 bulan mencapai **1,8 juta bayi**

Melalui TKDD (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Otsus Papua)



Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar **6.452 Puskesmas**



Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan **642 Rumah Sakit (RS)**



Bantuan Operasional Kesehatan **9.993 Puskesmas**



Bantuan Operasional KB untuk **18.001 faskes** dan **7.144 kecamatan**



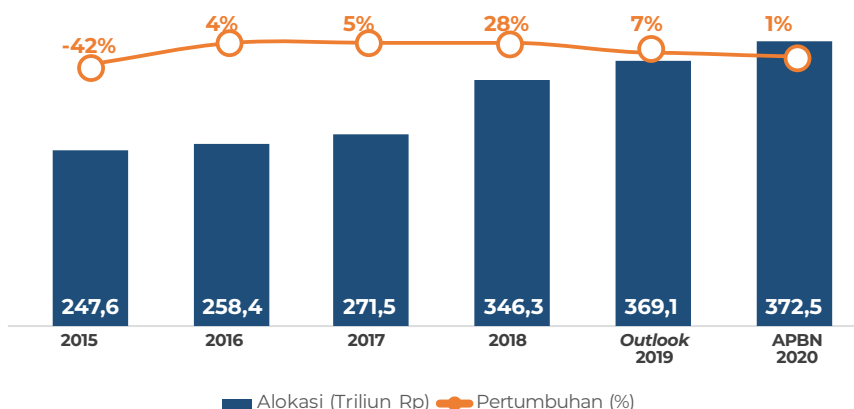
Penguatan Intervensi *Stunting* di **260 Kab/Kota**



Pembangunan RS Pratama **12 Kab/kota**

Perlindungan Sosial

percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 2020 dilakukan melalui penguatan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan dana desa



Anggaran perlindungan sosial mencakup PKH, Bantuan Pangan, PIP, PBI JKN, Bidik Misi/KIP Kuliah, subsidi (di luar subsidi pajak), dan Dana Desa, serta pengeluaran pembiayaan untuk kredit ultra mikro

Kebijakan

- melanjutkan program perlindungan sosial seperti PKH, PIP, Subsidi dan Pembiayaan Ultra Mikro
- penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi KIP Kuliah, transformasi Bantuan pangan menjadi Kartu Sembako, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan program JKN
- peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan subsidi
- penyempurnaan kebijakan pengalokasian Dana Desa
- peningkatan ketepatan sasaran menggunakan *single data*, pemanfaatan *Information, Communications and Technology* (ICT), serta penguatan *money*.

APBN 2020
(triliun Rupiah)

Outlook 2019
(triliun Rupiah)

Indikator Kesejahteraan Sosial

Tingkat Kemiskinan (%)

APBN 2020: 8,5-9,0 Outlook 2019: 9,4

Rasio Gini

APBN 2020: 0,380-0,375 Outlook 2019: 0,382

Capaian dan Target Perlindungan Sosial

Bidikmisi/ KIP Kuliah (ribu mahasiswa)

2018		392,6
2019		463,6
2020		819,4

Program Indonesia Pintar (Juta Siswa)

2018		20,4
2019		20,1
2020		20,1

PBI Program JKN (Juta Jiwa)

2018		92,4
2019		96,8
2020		96,8

Kredit Pembiayaan Ultra Mikro (Juta Debitur, Akumulasi)

2018		0,8
2019		1,4
2020		1,6

Bansos Pangan/ Kartu Sembako (Juta KPM)

2018		15,6
2019		15,6
2020		15,6

Program Keluarga Harapan (Juta KPM)

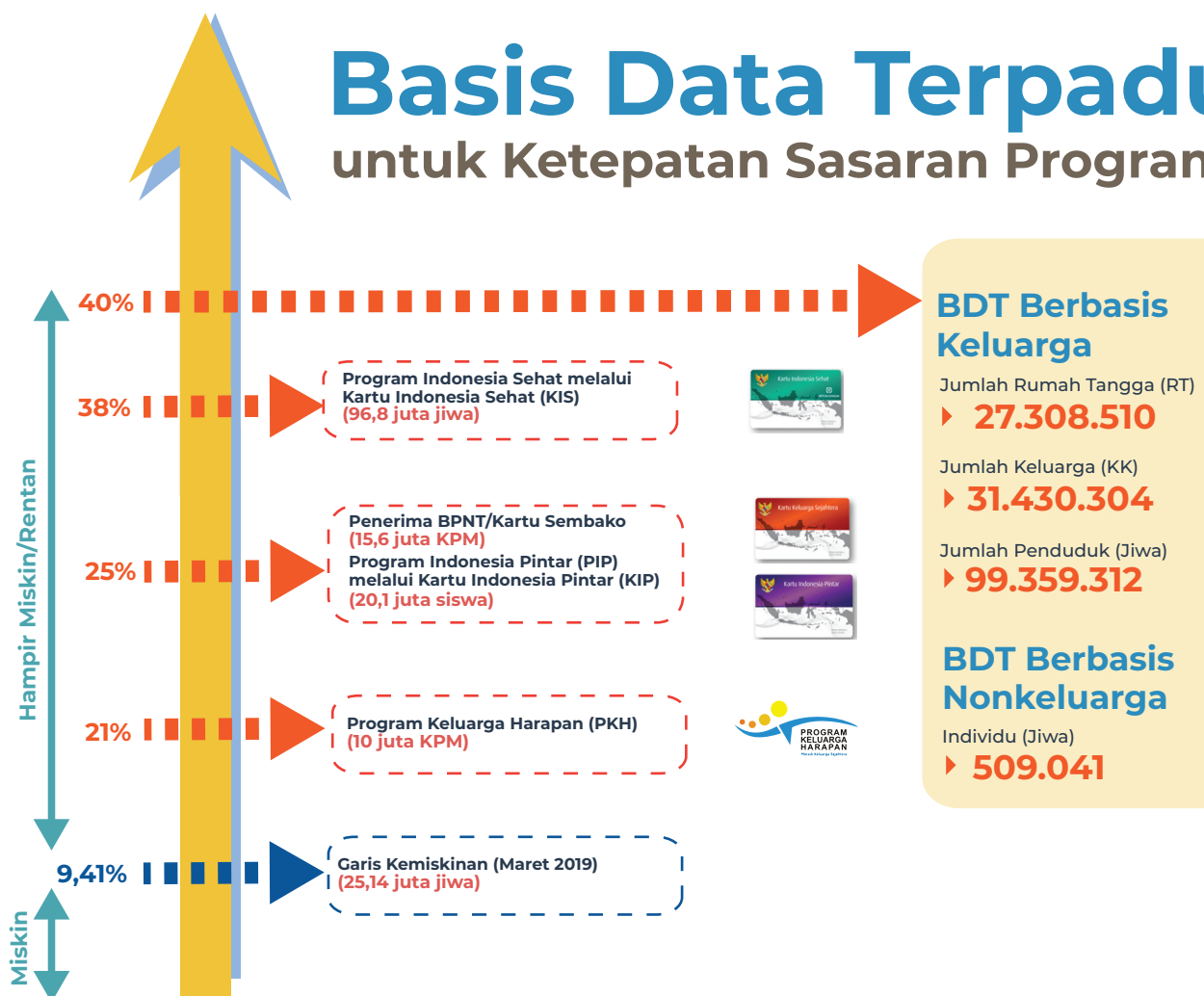
2018		10
2019		10
2020		10

Perlindungan Sosial

percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan 2020 dilakukan melalui penguatan bantuan pangan, pendidikan, kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan dana desa



Basis Data Terpadu untuk Ketepatan Sasaran Program



Keterangan:

*) Berdasarkan Kepmensos Nomor 8/HUK/2019 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Januari 2019

Sumber: Bappenas, diolah

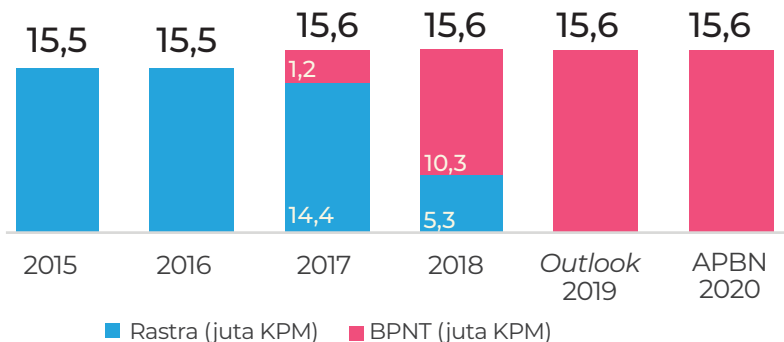
Kartu Sembako

Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako



Tujuan

- Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Meningkatkan ketepatan sasaran
- Memberikan pilihan dan kendali dalam memenuhi kebutuhan pangan
- Memberikan akses keluarga miskin terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi yang diperlukan, sehingga akan memiliki pengaruh terhadap penurunan *stunting*



Pengembangan bantuan pangan menjadi
Kartu Sembako 2020

Rp28,1 T
(APBN 2020)

Rp20,4 T
(Outlook 2019)



Bantuan Pangan

penerima
15,6 juta
keluarga penerima manfaat
nilai bantuan
110.000
per bulan

Komoditas
Beras
dan atau
telur



Kartu Sembako

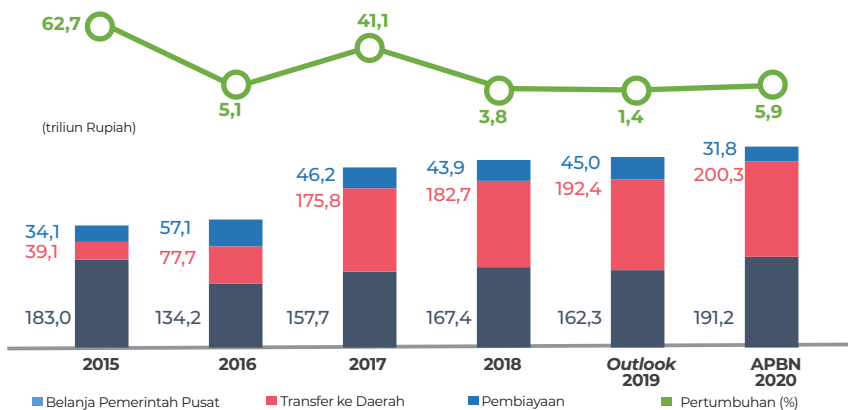
penerima
15,6 juta
keluarga penerima manfaat
nilai bantuan
150.000
per bulan

Komoditas
Beras
dan atau
telur

+
Ditambah bahan
pangan dengan
kandungan
gizi lainnya

Anggaran Infrastruktur

Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur



APBN 2020 (triliun Rupiah) Outlook 2019 (triliun Rupiah)

Melalui Belanja Pusat

191,2 162,3

Melalui Transfer ke Daerah

200,3 192,4

Melalui Pembiayaan

31,8 45,0

Kebijakan

- Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0;
- Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
- Mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah
- Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif
- Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional
- Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur

Indikator Pembangunan Infrastruktur

Persentase kondisi mantap jalan

94 93

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia

Menuju 40 Menuju 40

Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian layak

50,0 47,8

Capaian dan Target Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Konektivitas

Jalan (km)

2018 766

2019 406

2020 486

Jembatan (m)

2018 16.638

2019 17.283

2020 19.014

Pembangunan tahap awal dan penyelesaian jalur Kereta Api (km'sp)

2018 351,3

2019 133,6

2020 238,8

Penyelesaian Bandara Baru (lokasi)

2018 4

2019 3

2020 3

Bendungan (unit)

2018 55

2019 51

2020 49

Perumahan untuk MBR

Rusun (unit)

2018 11.670

2019 6.873

2020 5.348

Rumah Khusus (unit)

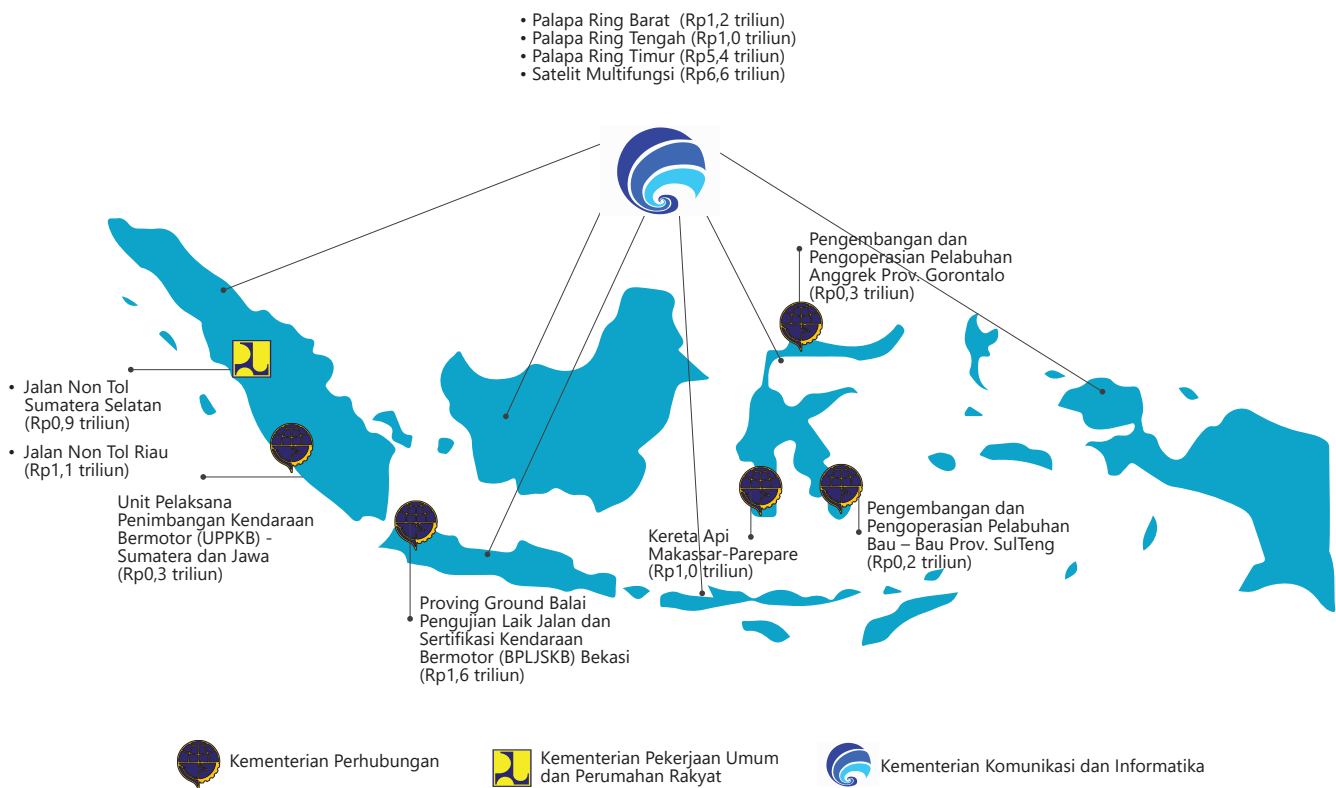
2018 4.525

2019 2.130

2020 2.000

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Keterlibatan peran swasta dan/atau BUMN dalam mendukung pembangunan Infrastruktur terus didorong antara lain melalui KPBU AP pada tahun 2020



Keterangan:

- Nilai tersebut merupakan nilai capex dan/atau estimasi nilai proyek
- Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar Rp19,7 triliun

Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP)

pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Kelebihan bagi Pemerintah

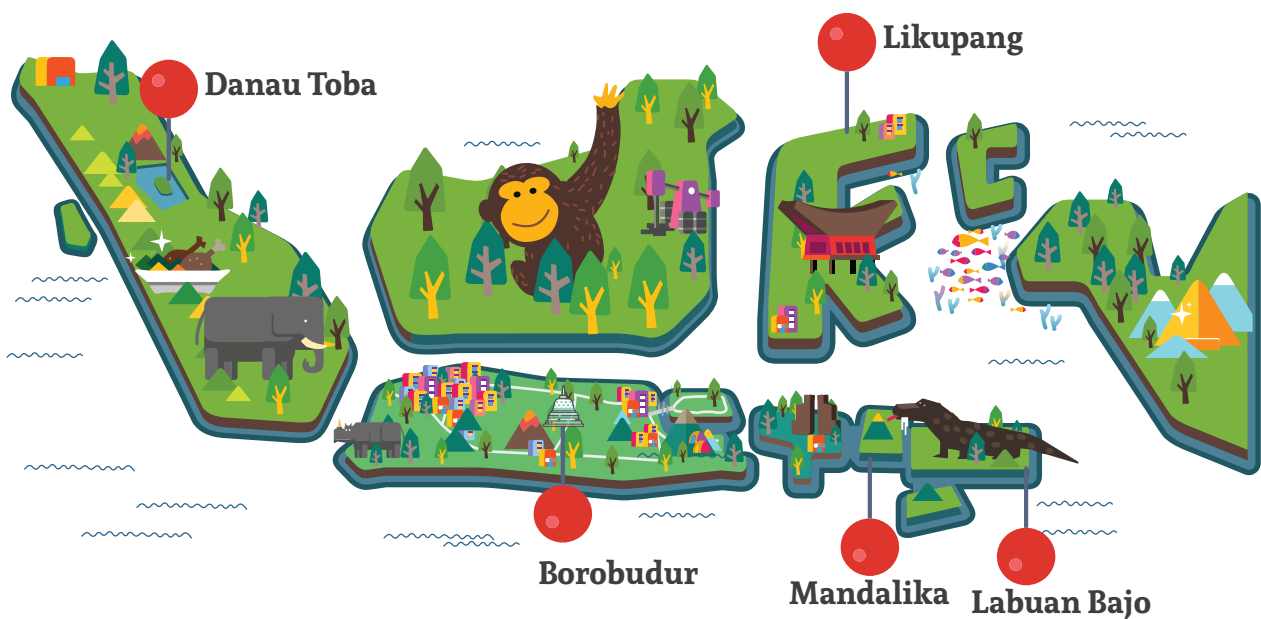
- Meningkatkan daya tarik proyek, khususnya proyek yang kurang layak secara finansial (misal infrastruktur sosial), bagi badan usaha
- Memungkinkan memperoleh layanan infrastruktur tanpa harus menyediakan dana yang besar pada awal proyek untuk konstruksi

Kelebihan bagi Badan Usaha

- Tidak menanggung risiko permintaan (*demand risk*)
- Kelayakan finansial dan pengembalian investasi terjamin

Destinasi Wisata Super Prioritas

Percepatan Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang) melalui sinergi lintas K/L



Pariwisata

merupakan sektor utama pembangunan nasional

1. Arahan Presiden --> infrastruktur di **5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang)** dituntaskan tahun 2020 : tata ruang, akses dan konektivitas, fasilitas di destinasi wisata, SDM, produk lokal, dan promosi terintegrasi --> sinergi lintas K/L dan Pemda
2. Alokasi anggaran tahun 2020 Rp10,17 T --> meningkat **6 kali lipat** dari alokasi 2019 (Rp1,69 T)

K/L yang terlibat a.l:



Kemen PUPR
Rp7,8 T



Kemenhub
Rp1,02 T



Kemenpar
Rp1,0 T



KLHK
Rp0,15 T



Kemen ESDM
Rp0,05 T



Kemendes PDDTT
Rp0,08 T



Kemendikbud
Rp0,05 T



Bekraf
Rp0,02 T

Target Kinerja Kemenpar Tahun 2020, a.l. :

Kontribusi PDB
Nasional **4,8%**

Kunjungan
Wisman 18,5 juta orang
dan **Wisnus 312 juta orang**



Devisa sebesar
USD 19-21 Miliar

Jumlah Tenaga
Kerja Pariwisata
sebanyak **13 juta orang**

* anggaran di atas merupakan anggaran untuk pengembangan 10 destinasi wisata prioritas

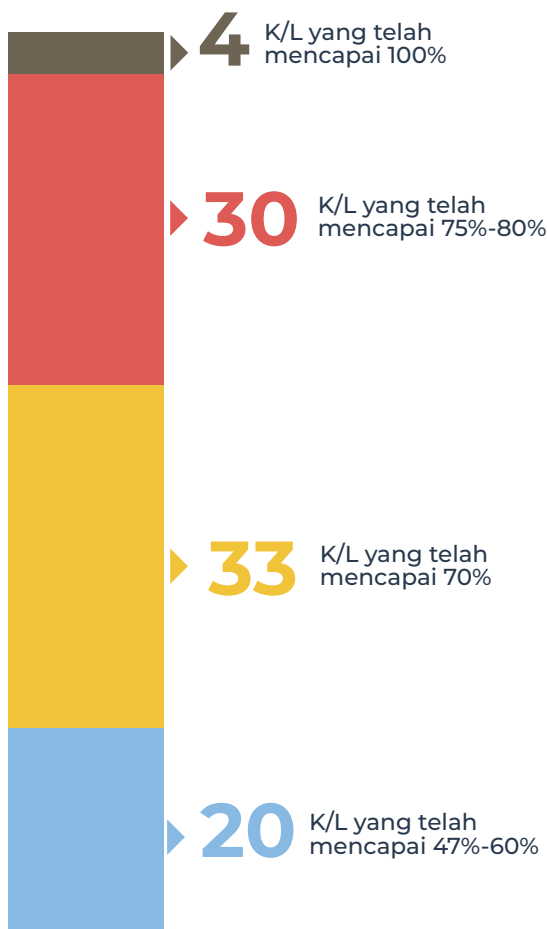
Reformasi Birokrasi

diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas dari korupsi



Capaian

Progres Reformasi Birokrasi (87 K/L)



Kebijakan dan Program

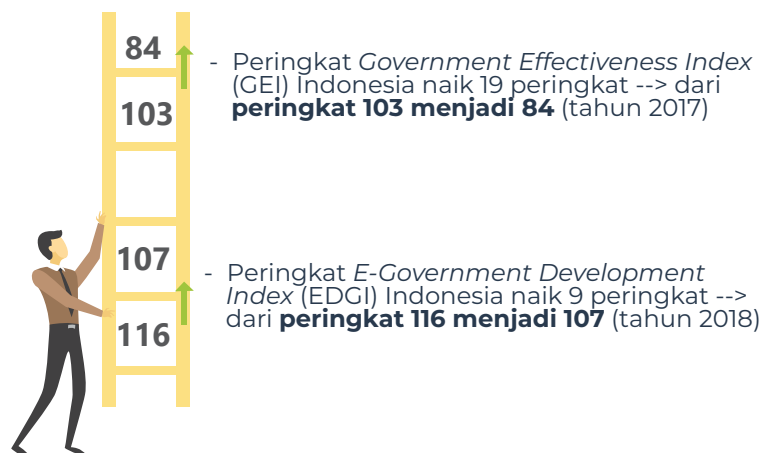
Mendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik

- Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan efisiensi --> Mal Pelayanan Publik
- Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat --> Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-procurement, satu data, satu peta)
- Mendorong profesionalisme ASN --> rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:

- Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR
- Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun

Penilaian Internasional



Subsidi Energi

diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan



Asumsi yang mempengaruhi perhitungan subsidi energi

APBN 2020 Outlook APBN 2019

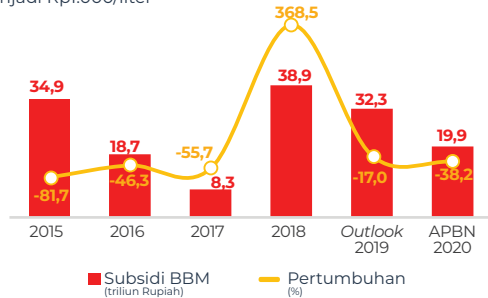
Nilai Tukar
Rp/USD
14.400
14.250

Harga Minyak
USD/barel
63
63

Harga Batubara
Acuan/HBA
USD/ton
90
92,1

Subsidi BBM

dikendalikan dengan mengurangi besaran subsidi tetap solar menjadi Rp1.000/liter

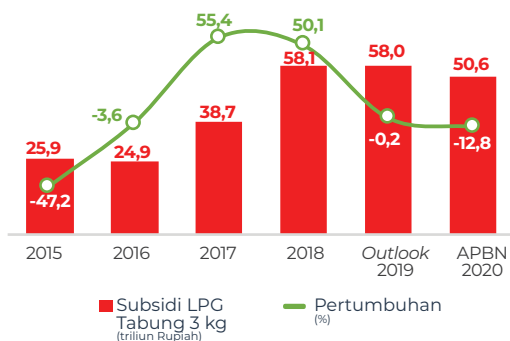


Kebijakan

- Pemberian subsidi tetap untuk solar Rp1.000.
- Subsidi harga untuk minyak tanah.
- Meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi.
- Penguatan sasaran penerima subsidi

Subsidi LPG 3 kg

diupayakan lebih tepat sasaran untuk rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani

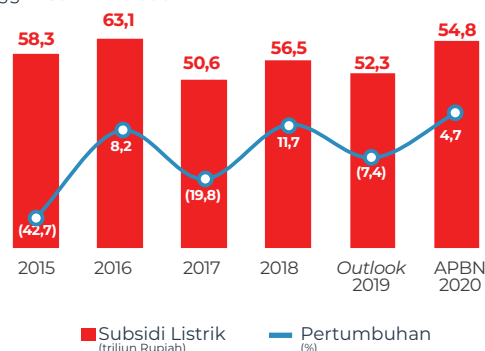


Kebijakan

- Subsidi selisih harga untuk LPG tabung 3 kg.
- Mengupayakan penyaluran LPG Tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi LPG tabung 3 kg.
- Penguatan sasaran penerima subsidi

Subsidi Listrik

diberikan pada golongan tertentu dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM) untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA



Kebijakan

- Subsidi listrik diberikan pada golongan tarif tertentu.
- Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM).
- Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.

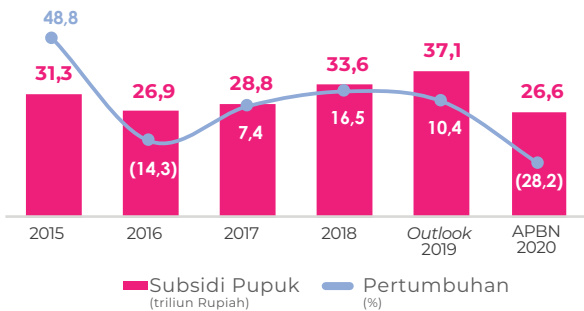
Subsidi Nonenergi

diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memperkuat pengendalian dan pengawasan



Subsidi Pupuk

diarahkan lebih tepat sasaran menggunakan Kartu Tani

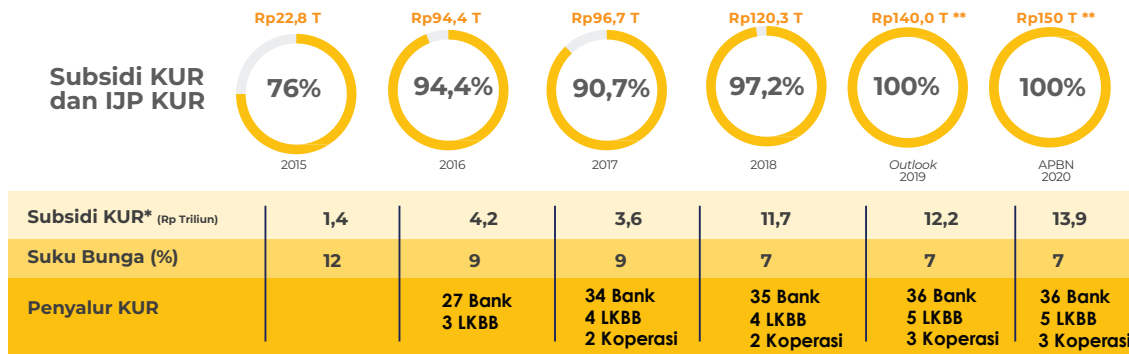


Kebijakan

- Validasi data penerima dan kebutuhan penerima pupuk bersubsidi --> e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)
- Perluasan penggunaan Kartu Tani dalam penyesuaian pupuk bersubsidi
- Penerapan komposisi pupuk berbasis komoditas dan lahan

Subsidi Bunga Kredit Program

diarahkan untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM dan TKI

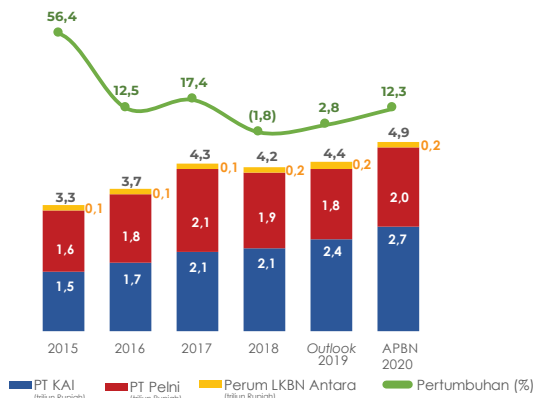


* Subsidi bunga KUR dan IJP KUR ** target penyaluran

Memperluas akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR kepada sekitar 16,47 juta orang

Subsidi PSO

diarahkan lebih tepat sasaran untuk peningkatan layanan publik

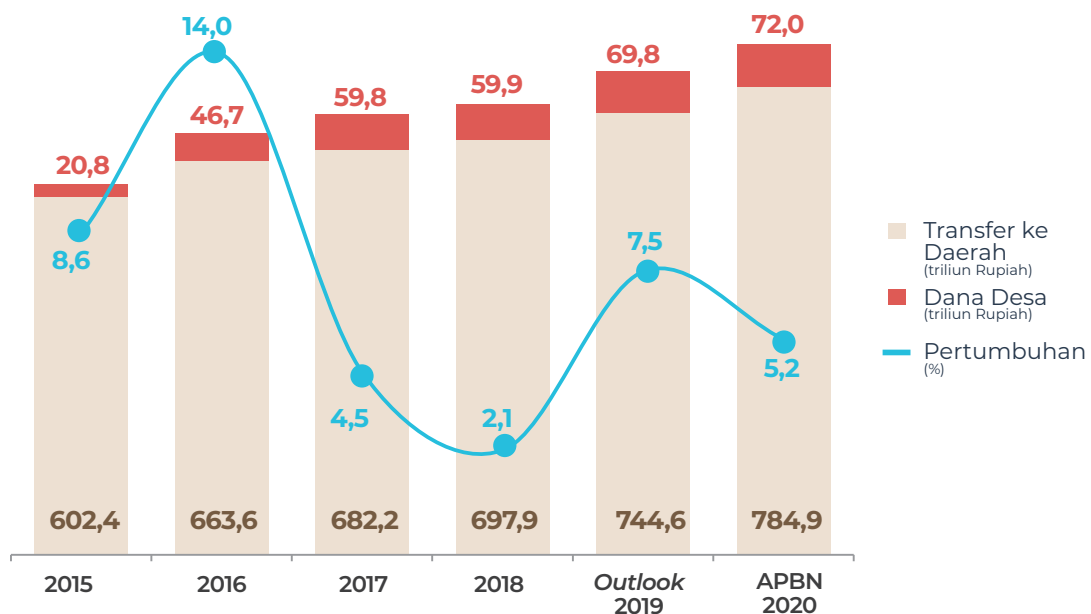


Kebijakan

- Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik untuk penumpang kapal laut kelas ekonomi (PT. PELNI sebesar Rp2,0 triliun)
- Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik untuk penumpang kereta api kelas ekonomi dan KRL Commuterline (PT. KAI sebesar Rp2,7 triliun)
- Penyediaan informasi publik bagi masyarakat terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan rawan konflik (LKBN Antara sebesar Rp167,7 miliar)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif



Dana Bagi Hasil

■ 117,6 ● 103,0

- Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.
- Memperluas penggunaan DBH Dana Reboisasi.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
- Pengendalian alokasi DBH dengan mempertimbangkan realisasi DBH 3 (tiga) tahun terakhir;
- Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangan kondisi keuangan negara.

Dana Alokasi Umum

■ 427,1 ● 417,8

- DAU bersifat final untuk memberi kepastian pendanaan bagi daerah.
- Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan, Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan penggajian pegawai PPPK.
- Menyempurnakan formulasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antardaerah.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan D.I.Y

■ 22,7 ● 22,2

- Memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Prov. Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.
- meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.

■ APBN 2020
(Triliun Rp)

● Outlook APBN 2019
(Triliun Rp)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif

■ APBN 2020
(Triliun Rp)

● Outlook APBN 2019
(Triliun Rp)

DAK Fisik

■ 72,2 ● 65,9

- Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.
- Memperkuat kebijakan afirmasi.
- Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.
- Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.
- Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

DAK Nonfisik

■ 130,3 ● 125,7

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
- Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
- Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.

Dana Insentif Daerah

■ 15,0 ● 10,0

- Memperkuat DID sebagai instrument insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.

Dana Desa

■ 72,0 ● 69,8

- Menyempurnakan kebijakan pengalokasian, dengan:
 - Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) dengan memerhatikan pemerataan dan keadilan;
 - Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi;
 - Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik; dan
- Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa

2019

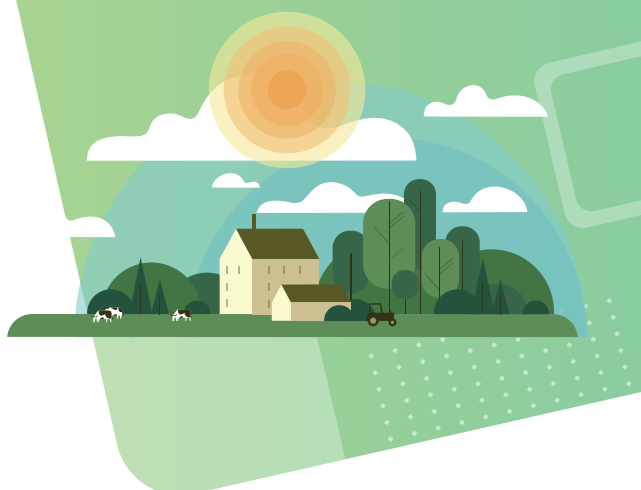


2020



Capaian Pemanfaatan Dana Desa

Menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa



Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat Desa



Jalan Desa
191,6 ribu km



Tambatan Perahu
5.371 unit



Jembatan Desa
1.140,4 km



Embung
4.175 unit



Pasar Desa
8.983 unit



Irigasi
58.931 unit



BUMDes
37.830 kegiatan



Sarana Olahraga
19.526 unit

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa



Penahan Tanah
192.974 unit



Sumur
45.169 unit



Air Bersih
959,6 ribu unit



PAUD Desa
50.854 unit



Sarana MCK
240.587 unit



Drainase
29.557,9 ribu meter



POLINDES
9.692 unit



POSYANDU
24.820 unit

Rasio Gini Perdesaan

2015		0,329
2016		0,316
2017		0,320
2018		0,319

Jumlah Penduduk Miskin di desa (juta jiwa)

2015		17,89
2016		17,28
2017		16,31
2018		15,54

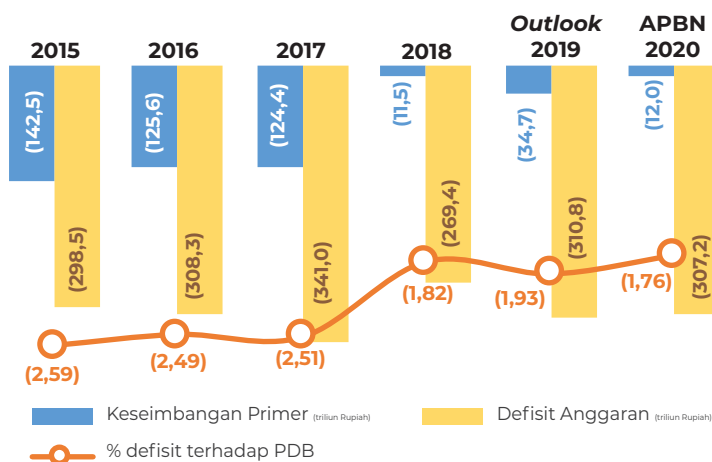
Persentase Penduduk Miskin di desa

2015		14,09
2016		13,96
2017		13,47
2018		13,10

Defisit & Pembiayaan Anggaran

Defisit APBN Tahun 2020 dijaga 1,76% PDB

diarahkan semakin sehat, adaptif, dan ekspansif dengan tetap menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan



Rasio defisit terhadap PDB tahun 2020 terendah dalam lima tahun terakhir

Pembiayaan Anggaran

Mendorong pengembangan skema pembiayaan inovatif dan pengendalian risiko yang solid untuk mengendalikan liabilitas

- Menjaga rasio utang di kisaran 30% terhadap PDB, *primary balance* menuju positif, menjaga defisit pada batas aman 1,76% terhadap PDB;
- Pemberian PMN untuk mendorong peran BUMN sebagai agen pembangunan dilakukan secara selektif dengan pertimbangan (mampu *me-leverage*, sehat secara finansial dan kesiapan proyek secara operasional);
- Penguatan peran quasi fiskal untuk akselerasi infrastruktur, kemudahan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan pembiayaan perumahan bagi MBR dan pengembangan EBT serta dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi, serta pembiayaan investasi untuk penguatan neraca transaksi berjalan;
- Mendorong pendalaman pasar SBN domestik, dan memanfaatkan SAL untuk antisipasi ketidakpastian;
- Terus mendorong LPDP sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan mendorong peningkatan ekspor melalui program *National Interest Account* (NIA).

Outlook 2019

310,8

373,9

381,8

-8,0

-75,8

-2,3

-

15,0

(triliun rupiah)

Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan Utang

SBN (neto)

Pinjaman (neto)

Pembiayaan Investasi

Pemberian Pinjaman

Kewajiban Penjaminan

Pembiayaan Lainnya

APBN 2020

307,2

351,9

389,0

-37,5

-74,2

5,2

-0,6

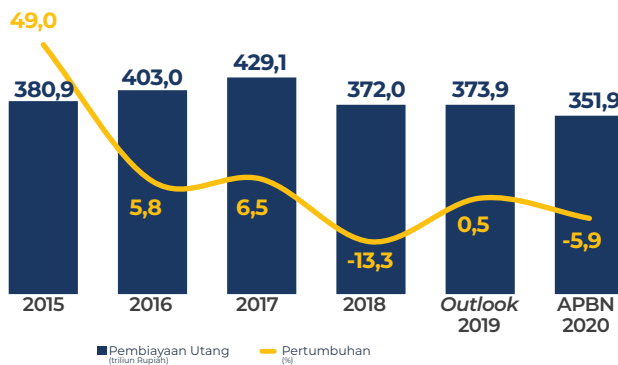
25,0

Pembiayaan Utang

pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik



Pembiayaan Utang



Arah Kebijakan

Hati-hati

- pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
- menjaga keseimbangan makro dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan

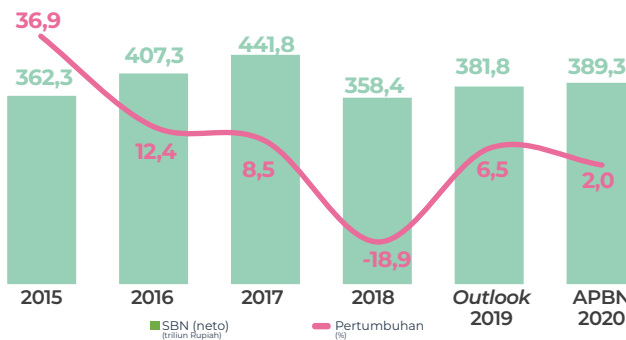
Efisiensi

Terciptanya efisiensi biaya utang

Produktif

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif

SBN (neto)



Strategi

- Meningkatkan efisiensi biaya utang
- Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pasar obligasi domestik (*financial deepening*)
- Pengelolaan utang secara aktif melalui manajemen kewajiban dan aset.
- Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif

Perbaikan *credit rating* dan penurunan *yield* SBN

	rating sebelumnya	rating per Juni 2019
STANDARD & POOR'S	BBB-	BBB
MOODY'S	Baa3***	Baa2
Fitch Ratings	BBB	BBB

Per 1 Juni 2019 S&P kembali menaikkan *rating* Indonesia menjadi BBB dan berdampak positif pada

- meningkatnya likuiditas pasar SBN domestik
- penguatan nilai tukar rupiah
- penurunan *yield* SBN

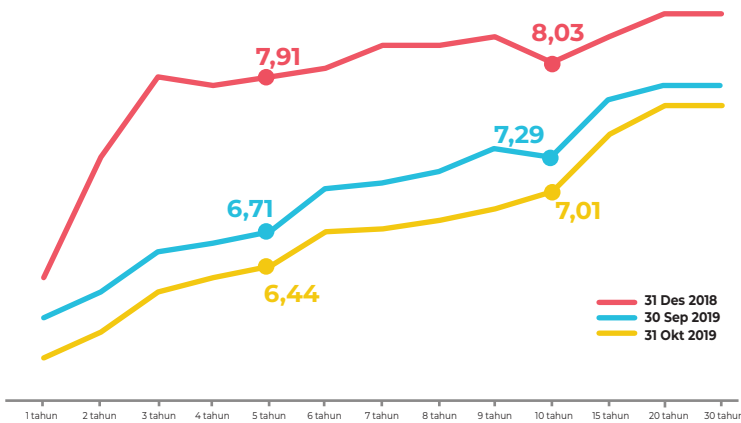
Pembiayaan Utang

pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik



Yield SBN 2018-2019

(persen)



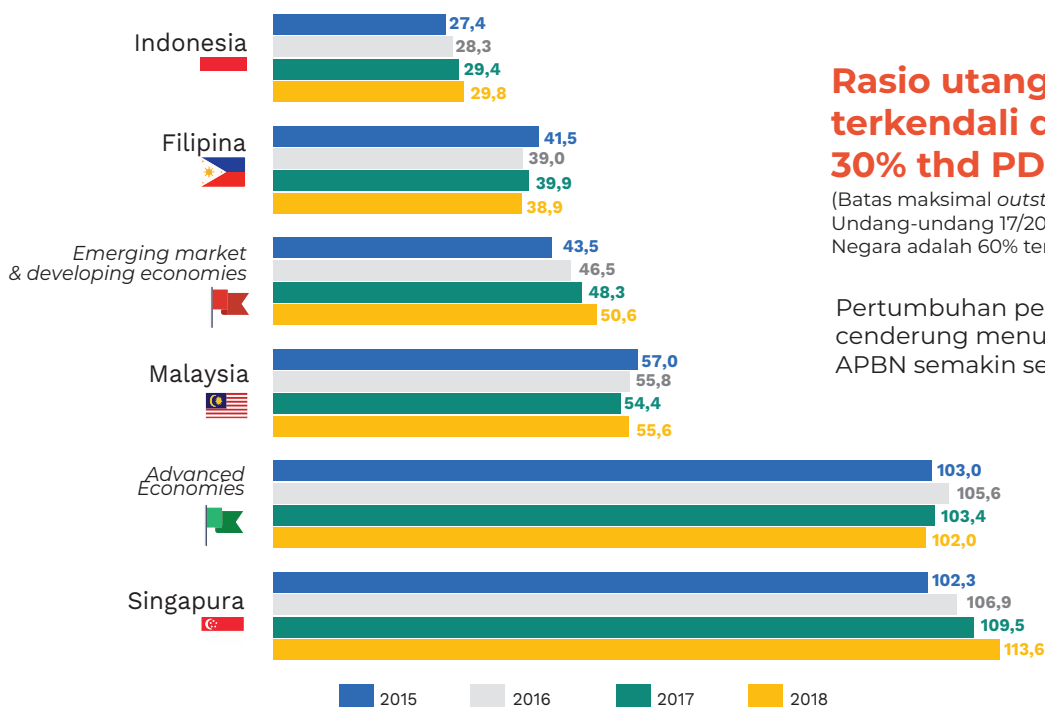
(sumber : Kemenkeu)

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan di bulan Oktober 2019 mencapai 5,33% menurun dibandingkan September 2019 yang mencapai 5,59%.

- Rilis data-data ekonomi AS yang mengindikasikan pelemahan ekonomi dan penurunan suku bunga The Fed disinyalir menjadi penyebab utama *net-foreign buying* pada pasar SBN yang mencapai Rp 13,6 triliun di bulan Oktober.
- Dari sisi domestik, pelonggaran kebijakan moneter dengan turunnya suku bunga acuan BI diperkirakan berdampak positif bagi lelang SBN oleh Pemerintah.

Rasio Utang beberapa negara

(persen)



(sumber : Kemenkeu & IMF)

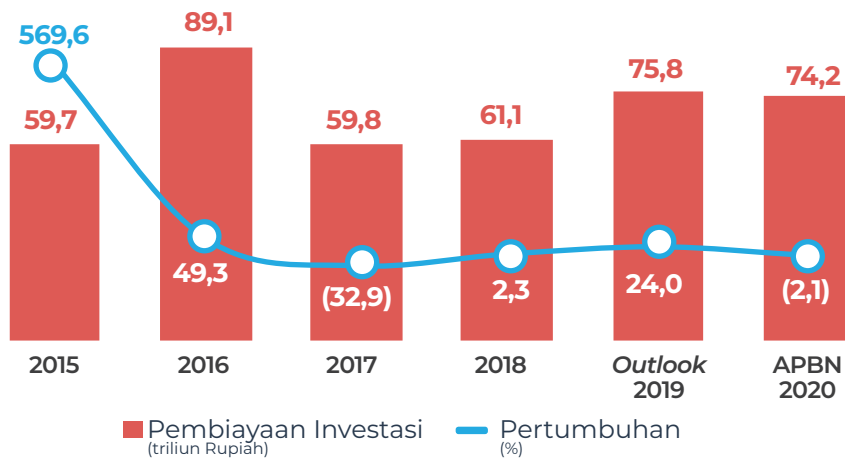
Rasio utang Indonesia terkendali dijaga di sekitar 30% thd PDB

(Batas maksimal *outstanding* utang sesuai Undang-undang 17/2003 tentang Keuangan Negara adalah 60% terhadap PDB)

Pertumbuhan pembiayaan utang cenderung menurun menandakan APBN semakin sehat dan mandiri

Pembiayaan Investasi

Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa



Meningkatkan Daya Saing Bangsa

- Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi
- Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi



Dana Abadi untuk Pendidikan

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi.



Dana pengembangan pendidikan nasional

untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 12.333 orang mahasiswa lanjutan, serta mendanai 104 riset

Dana abadi penelitian

meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar

Dana abadi kebudayaan

menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan

Dana abadi perguruan tinggi

untuk pengembangan SDM dan sarana dan prasarana dalam mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju *World Class University*

Mendorong Program Ekspor Nasional

- PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor
- Investasi Pemerintah untuk mendorong peningkatan ekspor ke negara-negara non tradisional seperti Afrika dan Asia Selatan melalui program *National Interest Account (NIA)*
- PMN untuk penguatan neraca transaksi berjalan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada dalam rangka mengakselerasi penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek



Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Peningkatan akses pendanaan dan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak sebanyak 102.500 unit rumah



GLOSSARY

Keseimbangan primer

sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan

Pajak

Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Kepabeanan dan Cukai

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP

Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Penerimaan Hibah

Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Tax ratio

dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA Migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.

Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

GLOSSARY

Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja Non-K/L (BA BUN)

Pengeluaran negara untuk Program Pengelolaan Utang Negara, Program Pengelolaan Subsidi, Program Pengelolaan Hibah, Program Pengelolaan Belanja Lainnya, dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus

Subsidi

Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

Subsidi Energi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

Subsidi Nonenergi

Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

Transfer ke Daerah

Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Dana Perimbangan

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Otonomi Khusus

diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

Dana Desa

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

GLOSSARY

Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari:

- **Fungsi Pelayanan Umum** a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);
- **Fungsi Pelayanan Umum** a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain);
- **Fungsi Pertahanan** a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;
- **Fungsi Ketertiban dan Keamanan** a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lintas; onomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
- **Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum** a.l. terdiri atas Fasilitas Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- **Fungsi Kesehatan** a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
- **Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri;
- **Fungsi Agama** a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha;
- **Fungsi Pendidikan** a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- **Fungsi Perlindungan Sosial** a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
- **Fungsi Lingkungan Hidup** a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi;

GLOSSARY

Pembiayaan Anggaran

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Surat Berharga Negara

Meliputi surat utang negara dan surat berharga syariah negara.

Surat Utang Negara (SUN)

Surat berharga berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya.

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Dana APBN yang dialokasikan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi.

Dana Bergulir

Dana yang dikelola oleh BLU tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pinjaman Dalam Negeri

Setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan masa berlakunya.

Kewajiban Penjaminan

Kewajiban yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dalam hal K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama

Pinjaman Luar Negeri Neto

Semua pembiayaan yang berasal dari penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri.

Pemberian Pinjaman

Pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.



Pengarah

Menteri Keuangan

Penanggung jawab:

Direktorat Jenderal Anggaran

Penyusun:

Direktorat Penyusunan APBN

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

Gedung Sutikno Slamet Lantai 12

Jalan Dr Wahidin Raya No.1

www.anggaran.kemenkeu.go.id



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN